



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN,
BNP2TKI, BADAN POM, BKKBN, BPJS KESEHATAN,
BPJS KETENAGAKERJAAN)**

Tahun Sidang : 2014-2015
Masa Persidangan : II
Jenis rapat : Rapat Dengar Pendapat
Rapat ke :
Sifat Rapat : Terbuka
Dengan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
(Badan POM RI)
Hari/Tanggal : Kamis, 29 Januari 2015
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Acara : 1. Penjelasan capaian kinerja atas program/kegiatan prioritas Tahun 2014;
2. Penjelasan mengenai grand design penguatan kelembagaan Badan POM sebagai salah satu ujung tombak pembangunan kesehatan;
3. Kesiapan Badan POM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015, khususnya bagi kemungkinan masuknya obat-obatan dan kosmetika baru dari luar negeri;
4. Peran Badan POM dalam mengurangi peredaran obat palsu sub-standard dan tidak berizin, kosmetika dan pangan yang mengandung bahan berbahaya;
5. Penjelasan Badan POM terkait revitalisasi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal;
6. Penjelasan Badan POM terkait penerapan Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GN-WOMI) di seluruh Indonesia.
Ketua Rapat : H. Syamsul Bachri S, M.Sc/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI;
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI

Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung
Nusantara 1, Lantai 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Hadir : A. orang dari 48 Anggota Komisi IX DPR RI;
B. Kepala Badan POM RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan POM RI dibuka pukul 10.15 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 251 ayat (1) dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI bersepakat untuk memperkuat Badan POM RI sebagai badan yang berwenang melakukan pengawasan dan penindakan secara mandiri tanpa bergantung pada institusi lain. Untuk itu, RUU tentang Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan Sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dijadikan prioritas pembahasan di Komisi IX DPR RI.
2. Komisi IX DPR RI meminta Badan POM RI membuat grand design pengawasan obat dan makanan di Indonesia yang memuat program dan kegiatan dengan arah dan sasaran yang jelas dan rinci, serta mencakup skala prioritas termasuk kebutuhan anggaran, untuk diserahkan kepada Komisi IX DPR RI.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 dengan memperhatikan masukan anggota Komisi IX DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) hari ini, antara lain:
 - a. Memastikan layanan informasi dan pengaduan masyarakat berlangsung aktif dan interaktif melalui berbagai media baik itu online maupun pelibatan perangkat pemerintah sampai ke tingkat kecamatan dan desa.
 - b. Perluasan Tupoksi Badan POM RI dengan adanya UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal dan UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
 - c. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi lintas sektor termasuk dengan MUI, Ombudsman RI dan pemerintah daerah.
 - d. Intensifikasi dan pengawalan atas tindak lanjut hasil temuan pengawasan obat dan makanan khususnya tindakan pro-justicia termasuk mengumumkan secara periodik kepada publik, termasuk

- produk dan pelaku usaha, sehingga masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif mengawal tindak lanjut tersebut.
- e. melakukan kerjasama yang lebih intensif dengan Satgas pemberantasan obat dan makanan ilegal dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Komisi IX DPR RI.
4. Komisi IX DPR RI mendorong Badan POM RI untuk mengintensifkan pemberdayaan masyarakat melalui program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan melibatkan anggota Komisi IX DPR RI.
 5. Komisi IX DPR RI mendukung langkah persiapan yang diambil Badan POM RI untuk menghadapi MEA, khususnya peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pemberian insentif serta kemudahan proses registrasi dan izin produk. Komisi IX DPR RI juga meminta Badan POM RI untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada produk lokal dengan terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan Cara Pembuatan Pangan yang Baik (CPPB).
 6. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk mempercepat pelaksanaan revitalisasi Balai Besar POM/Balai POM di 33 provinsi serta Pos POM di wilayah perbatasan, sehingga pengawasan yang dilakukan dapat lebih ditingkatkan termasuk pengetatan pengawasan di daerah perbatasan, pelabuhan, bandar udara serta di daerah yang sulit dijangkau.
 7. Komisi IX DPR RI meminta Badan POM RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota pada RDP hari ini, paling lambat pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015.

Rapat diakhiri pukul 16.45 WIB.

KEPALA BADAN POM RI,



Dr. ROY A. SPARRINGGA, M.APP.Sc

KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,



H. SYAMSUL BACHRI S., M.Sc

A-312